

Monitoring Pengembangan Kapasitas SDM pada OPD di Pemerintah Kota Semarang

Semarang, 22 September 2017

LATAR BELAKANG

- ▶ BKN AWARDS TAHUN 2017 untuk Pemerintah Kota Semarang
- ▶ Peraturan perundang-undangan :
 - ▶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
 - ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

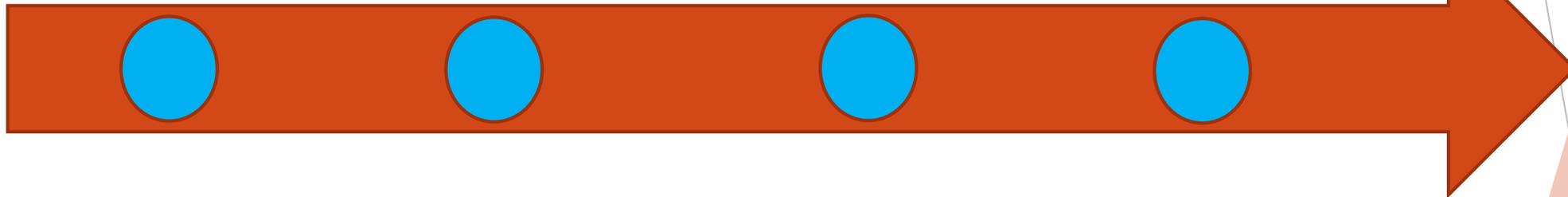
Pengembangan Kompetensi

- ▶ UU no.5 Tahun 2014 Pasal 70
 - ▶ Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat, seminar, kursus dan penataran atau kegiatan yang sejenis seperti bimbingan teknis, workshop & lokakarya
- ▶ PP no. 11 Tahun 2017 Pasal 203
 - ▶ (3) Setiap PNS memiliki kesempatan & hak yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan
 - ▶ (4) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun

HAKEKAT UU ASN

ASN professional, bebas
KKN, Pelayanan Publik &
Perekat Persatuan Bangsa

Kewajiban Pegawai ASN
dalam Pengembangan
kompetensi



Manajemen Merit ASN
didasarkan pada
pertimbangan kompetensi
dan kualifikasi

ASN professional, bebas
KKN, Pelayanan Publik &
Perekat Persatuan Bangsa

The Global Competitiveness Report 2015-2016

(Peringkat Indonesia turun dari ke-34 di tahun 2014-2015 menjadi ke-37 di tahun 2015-2016)

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

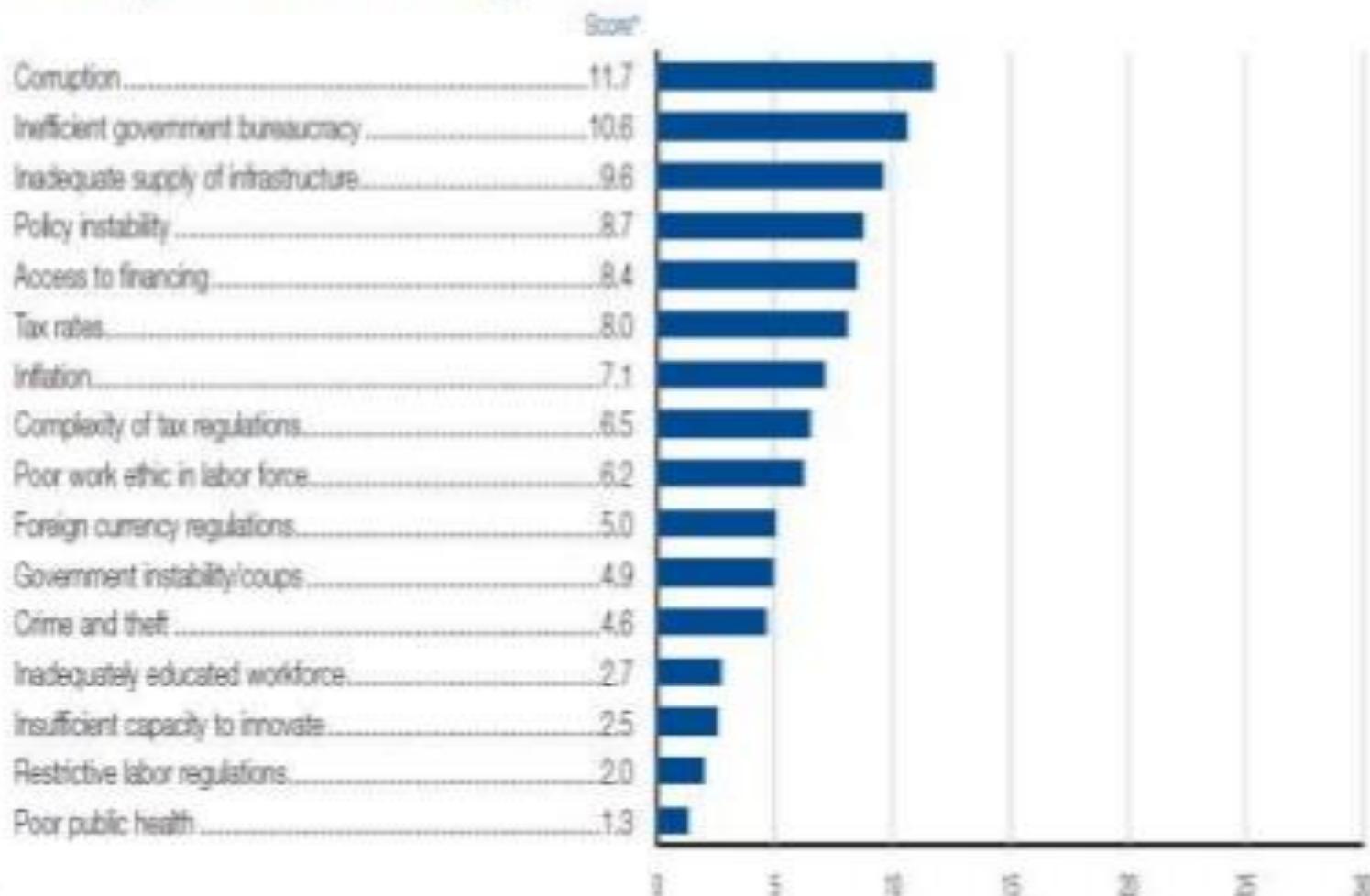
Top five spots and some Asian countries' rankings

Countries	2015-16 ranking	Score (1-7)	2014-15 ranking
Switzerland	↔ 1	5.76	1
Singapore	↔ 2	5.68	2
US	↔ 3	5.61	3
Germany	↑ 4	5.53	5
Netherlands	↑ 5	5.5	8
Japan	↔ 6	5.47	6
Hong Kong	↔ 7	5.46	7
Taiwan	↓ 15	5.28	14
Malaysia	↑ 18	5.23	20
Korea	↔ 26	4.99	26
China	↔ 28	4.89	28
Thailand	↓ 32	4.66	31
Indonesia	↓ 37	4.52	34
Philippines	↑ 47	4.39	52
India	↑ 55	4.31	71
Vietnam	↑ 56	4.3	68
Laos	↑ 83	4	93
Cambodia	↑ 90	3.94	95
Myanmar	↑ 131	3.37	134

Source: World Economic Forum

PO3Graphics

The most problematic factors for doing business



Worldwide Governance Indicators

EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN

- *The quality of public services,*
- *The quality of the civil service,*
- the degree of its independence from political pressures,
- the quality of policy formulation and implementation,
- the credibility of the government's commitment to such policies.

Country	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
BRUNEI DARUSSALAM	77,51	0,90	77,25	0,89	75,12	0,83	74,16	0,86	81,73	1,08
CAMBODIA	18,66	-0,92	19,91	-0,85	22,01	-0,83	19,14	-0,92	25,48	-0,68
INDONESIA	47,85	-0,20	46,45	-0,25	44,02	-0,29	45,45	-0,24	54,81	-0,01
LAO PDR	20,10	-0,87	20,38	-0,85	21,05	-0,88	24,40	-0,76	39,42	-0,39
MALAYSIA	82,78	1,13	81,04	1,03	80,38	1,01	81,82	1,10	83,65	1,14
MYANMAR	2,39	-1,65	3,32	-1,63	3,83	-1,53	4,78	-1,51	8,65	-1,28
PHILIPPINES	55,50	-0,02	57,35	0,08	57,89	0,08	57,42	0,06	61,54	0,19
SINGAPORE	100,00	2,26	99,53	2,17	99,52	2,15	99,52	2,07	100,00	2,19
THAILAND	62,20	0,19	61,14	0,21	60,77	0,21	61,24	0,21	65,87	0,34
VIETNAM	45,93	-0,26	47,39	-0,23	44,50	-0,29	44,02	-0,30	52,40	-0,06

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

Doing Business 2016

Measuring Regulatory Quality and Efficiency

No	Negara ASEAN	EODB Rank 2012 (World)	EODB Rank 2013 (World)	EODB Rank 2014 (World)	EODB Rank 2015 (World)	EODB Rank 2016 (World)
1	Singapura	1	1	1	1	1
2	Malaysia	18	12	6	18	18
3	Thailand	17	18	18	26	49
4	Vietnam	98	99	99	78	90
5	Filipina	136	138	108	95	103
6	Brunai Darussalam	83	79	59	101	84
7	Indonesia	129	128	120	114	109
8	Kamboja	138	133	137	135	127
9	Laos	165	163	159	148	134
10	Myanmar	---	---	---	177	167

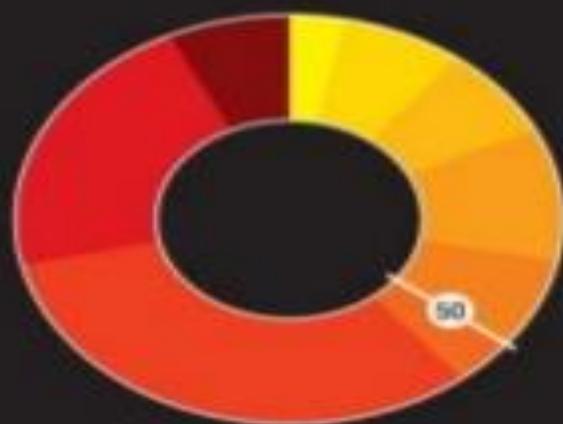
Source: <http://www.doingbusiness.org/rankings> (World Bank Group)

Ease of doing business 2016

Countries	Indonesia	Singapore	Vietnam
Starting a business			
Procedures (number)	13	3	10
Time (days)	47.8	2.5	20
Dealing with construction permit			
Procedures (number)	17	10	10
Time (days)	210.2	26	166
Electricity set up cost (% of income per capita)			
	383	25.9	1,322.6
Registering a property			
Procedures (number)	5	4	5
Time (days)	27.4	4.5	57.5
Quality of land administration index (0-30)	8.3	26.5	14

Source: The World Bank

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013: ASIA PACIFIC



The perceived levels of public sector corruption.

64% score below 50

Top: New Zealand

Bottom: Afghanistan, Korea (North)



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	91
5	Singapore	86
9	Australia	81
15	Hong Kong	75
18	Japan	74
31	Bhutan	63
36	Taiwan	61
38	Brunei	60
46	Korea (South)	55

53	Malaysia	50
80	China	40
83	Mongolia	38
91	Sri Lanka	37
94	India	36
94	Philippines	36
102	Thailand	35
114	Indonesia	32
116	Nepal	31
116	Vietnam	31

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
119	Timor-Leste	30
127	Pakistan	28
136	Bangladesh	27
140	Laos	26
144	Papua New Guinea	25
157	Myanmar	21
160	Cambodia	20
175	Afghanistan	8
175	Korea (North)	8

The 2013 Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in 177 countries/territories around the world. To see the full results go to:

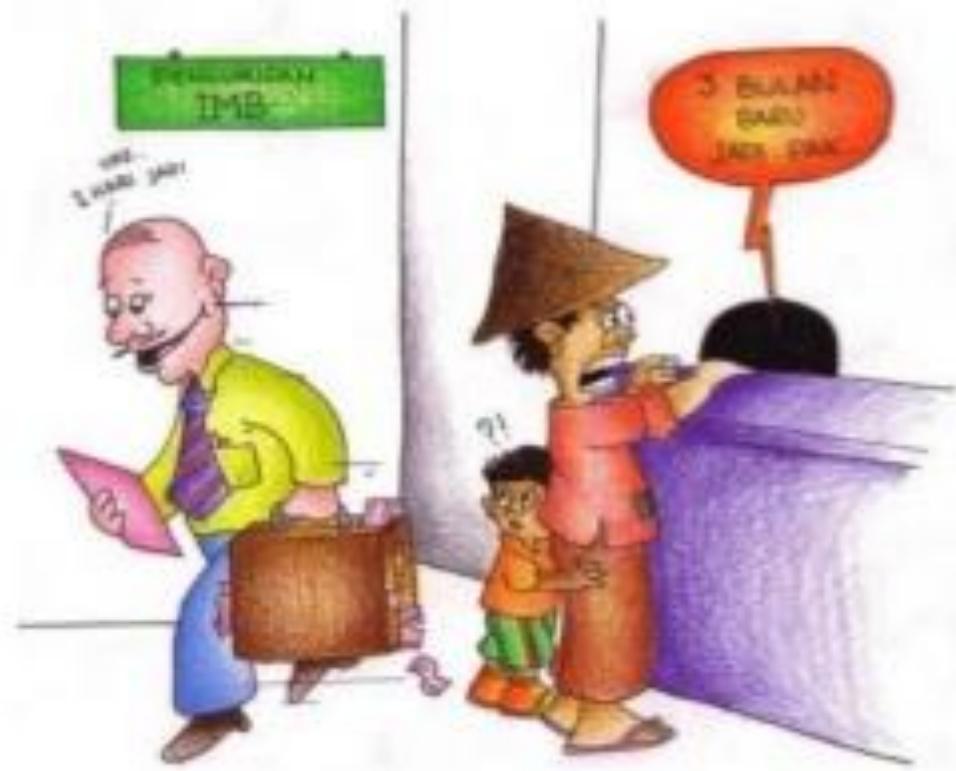
www.transparency.org/cpi

#stopthecorrupt

- Tahun 2014, Skor IPK Indonesia 34 di peringkat 107
- Tahun 2015, Skor IPK Indonesia 36 di peringkat 88

POTRET PELAYANAN





POTRET BIROKRASI



TANTANGAN PERMASALAHAN

- Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel (rendahnya komitmen pimpinan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, manajemen kinerja masih belum diterapkan, manajemen pembangunan nasional belum berjalan optimal),

The top of the slide features a dark background with several lightbulb icons. One lightbulb is illuminated with yellow rays, while others are unlit. A thick yellow curved line arches over the text area.

LANJUTAN...

- Birokrasi belum efektif dan efisien (tata kelola pemerintahan yg baik belum diterapkan, lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa belum efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi belum efektif, penerapan e-gov belum efektif dan efisien, manajemen SDM aparatur belum efektif, in-efisiensi dalam penggunaan anggaran, diklat kepemimpinan belum mendorong kinerja organisasi),

LANJUTAN...

- Pelayanan publik belum mempunyai kualitas yang diharapkan (pelayanan perijinan belum efektif dan efisien, praktik pungutan liar masih ada, praktik manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik).



POTRET PEGAWAI ASN BELUM BAIK

KOTA SEMARANG

◉ Jatingaleh



KOTA SEMARANG

◉ Kota Lama / Stasiun Tawang



KOTA SEMARANG

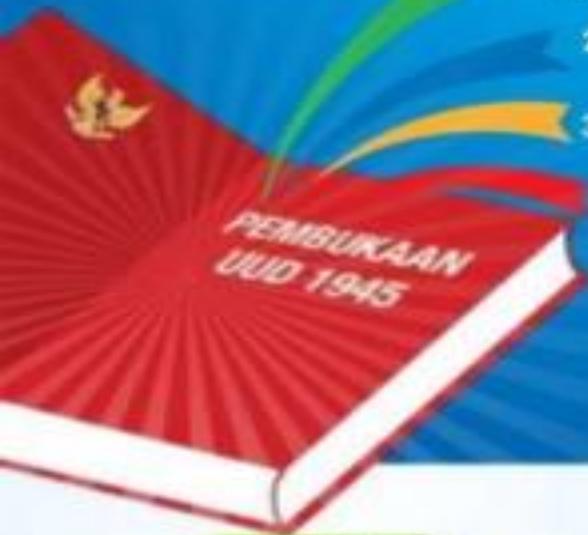
○ Pedagang Kaki Lima



VISI, MISI DAN PLATFORM PERUBAHAN

AMANAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945:

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. IKUT MEMELIHARA KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, KEADILAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN ABADI



VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI

1. MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL YANG MAMPU MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH, MENOPANG KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGAMANKAN SUMBERDAYA MARITIM, DAN MENCERMINKAN KEPRIKIBADIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM.
3. MEWUJUDKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF DAN MEMPERKUAT JATI DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM.
4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.
5. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING.
6. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL.
7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN.



TUNTUTAN KEBIJAKAN



NAWA CITA

Nawa (Sembilan) Agenda Prioritas Visi dan Misi Jokowi-JK :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA

3 PROGRAM WAJIB, **4** PROGRAM PRIORITAS & **1** PROGRAM DUKUNGAN

PROGRAM WAJIB

KESEHATAN

PENDIDIKAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN POROS MARITIM

PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM DUKUNGAN

REFORMASI BIROKRASI



ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019



1. Masalah yg dihadapi / ingin dipecahkan



Masalah

- Ketahanan pangan lemah, ketergantungan komoditi dari LN masih tinggi, dll.

- Daya saing bangsa yg rendah.

Kebutuhan Kompetensi

- Analisis kebijakan pertanian;
- Penyelia pendamping petani;
- Pengawas logistik.

- Analisis investasi;
- Quality guarantor produk lokal;
- Penyelia pendamping Koperasi & UKM.

Masalah

- Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum tinggi.
- Kerusakan & degradasi lingkungan hidup.

Kebutuhan Kompetensi

- Analis kontrak/ perjanjian kerja;
- Spesialis adjudikasi/ resolusi konflik;
- Penyuluh hukum administrasi.
- Analis tata ruang;
- Inspektur AMDAL;
- Penyelia mutu lingkungan;

TRANSFORMASI ASN : PROFESIONALISME

Pasal 3

**UU No.
8/1974**

- Aparatur Negara
- Abdi Negara
- Abdi Masyarakat

Pasal 9

**UU No.
5/2014**

- Pelaksana Kebijakan Publik
- Pelayan Publik
- Perekat & Pemersatu Bangsa



education

Apa itu Kompetensi?

1. The **knowledge, skills, abilities and behaviors** that an employee applies in performing his/her work and that are the key employee-related levers for achieving results that are relevant to the organization's business strategies.

(Treasury Board of Canada Secretariat, *Framework for Competency-Based Management in the Public Service of Canada*, 1999).

2. The consistent application of **knowledge and skill** to the standard of performance required in the workplace. It embodies the **ability to transfer and apply skills and knowledge to new situations and environments**.

(South Australia Public Sector Management Division, *Middle Manager Competency Framework*).

Kegiatan	Jam Pembelajaran	Kurikulum	Akhir Kegiatan
Diklat	Min 30 JP	Pengetahuan Keterampilan Sikap	Sertifikat
Bimtek	Maks 30 JP	Pengetahuan Keterampilan	Sertifikat
Pelatihan, Kursus	Maks 20 JP	Keterampilan	Peserta Terampil
Sosialisasi, Sinkronisasi, Penataran, Seminar	Maks 20 JP	Pengetahuan	Peserta Paham
Workshop, Lokakarya	Maks 20 JP	Pengetahuan	Peserta Mempunyai Panduan / Pedoman Kerja

MEKANISME PENYELENGGARAAN BIMTEK, WORKSHOP, LOKAKARYA

RENCANA PELAKSANAAN BIMTEK, WORKSHOP, LOKAKARYA

1. Pada Perwal No. 87/2016 ttg SOTK BKD Salah satu tugas BKD adalah pengendalian mutu pada kegiatan pengembangan kompetensi di Pemerintah Kota Semarang



2. Pelaksanaan IKU Kota Semarang : Mengetahui Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek, Workshop, Pelatihan atau Pendidikan selama setahun

3. Dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran (total quality education) agar outcome kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tercapai

Tahapan Pengembangan Kompetensi

- ▶ Tahap Persiapan Rencana Kegiatan
 - ▶ Penyiapan TOR & KAK
 - ▶ Pembentukan kepanitiaan penyelenggara kegiatan
 - ▶ Penentuan kriteria peserta
 - ▶ Penentuan kurikulum dan metode pembelajaran
 - ▶ Penentuan kriteria narasumber
 - ▶ Penyusunan pedoman penyelenggaraan
 - ▶ Penentuan tempat
 - ▶ Penentuan waktu dan penyusunan jadwal

Tahapan Pengembangan Kompetensi

- ▶ Tahap Persiapan Operasional Kegiatan
 - ▶ Persiapan kelengkapan administrasi
 - ▶ Pengiriman informasi kegiatan kepada calon peserta
 - ▶ Penentuan nama dan pengiriman informasi kegiatan kepada narasumber
 - ▶ Penyusunan nama peserta kegiatan
 - ▶ Persiapan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan
 - ▶ Persiapan materi pembelajaran

Tahapan Pengembangan Kompetensi

- ▶ Tahap Penyelenggaraan Kegiatan
 - ▶ Penerimaan peserta dan pemeriksaan tempat serta konsumsi
 - ▶ Pembukaan kegiatan
 - ▶ Penjelasan program
 - ▶ Pelaksanaan pembelajaran
 - ▶ Penutupan kegiatan



TERIMA

KASIH